



RAGU KONSISTENSI KPU

TETIBA WAKTU PERBAIKAN DOKUMEN BACALEG DIPERPANJANG HINGGA 16 JULI

Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Minggu, 9 Juli 2023 pukul 23.59 WIB adalah hari terakhir penyerahan perbaikan dokumen administrasi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Tapi kejutan terungkap, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengirimkan surat dinas ke jajarannya di daerah, yakni KPU provinsi dan kabupaten/kota. KPU Daerah diminta untuk kembali membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan untuk menghimpun berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas bacaleg mereka hingga 16 Juli 2023. Wajar bila memunculkan tanda tanya besar, karena menurut jadwal tahapan yang telah ditetapkan harusnya mulai 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 dilakukan verifikasi administrasi perbaikan Bacaleg. Kemudian, pada 6-11 Agustus 2023 akan dilakukan pencermatan daftar calon sementara (DCS). Main dibongkar pasang aturan tanpa kredibilitas dan akuntabilitas dikhawatirkan menjadi gangguan serius Pemilu 2024.

(Baca Hal 11)



Ketua KPU
Hasyim Asy'ari

DASAR PERPANJANGAN PERBAIKAN DOKUMEN BACALEG

Surat Dinas KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditekankan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Senin (10/7/2023)

KPU RI meminta jajarannya di daerah meng-"unlock" fitur hasil pemeriksaan perbaikan partai politik peserta pemilu dan memberi "status pengembalian" di Silon sampai 16 Juli 2023.

KPU daerah diminta memastikan bahwa perbaikan pada kesempatan ini betul-betul hanya perbaikan dokumen, bukan penggantian bacaleg yang sebelumnya sudah diizinkan pada masa perbaikan 26 Juni-9 Juli 2023.

KPU daerah juga diminta mengingatkan partai politik melakukan submit perbaikan setelah mengganti dokumen di Silon. Setelahnya, KPU daerah diminta melakukan analisis kegunaan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen yang terakhir diganti.

KPU RI meminta, pengajuan perbaikan kembali ini tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 423 Tahun 2023, dan persuratan lainnya dari KPU terkait pencalegan.

TAHAPAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DALAM PROSES PENDAFTARAN BACALEG

(Sesuai Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023)

10 Juli sampai 6 Agustus 2023: Verifikasi administrasi perbaikan dokumen

6 sampai 11 Agustus 2023: pencermatan rancangan DCS

12 sampai 18 Agustus 2023: penyusunan dan penetapan DCS

19 sampai 23 Agustus 2023: pengumuman DCS

19 sampai 28 Agustus 2023: masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS

Government (Hal.2) Akhirnya Sekretaris MA Resmi Ditahan



Akhirnya Sekretaris MA Resmi Ditahan Diduga Terima Rp 3 M, Ada Kode 'Jalur Atas Bawah'



Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan kenakan rompi oranye khas tahanan KPK, Rabu (12/7/2023) usai diperiksa sebagai tersangka. (ist)

JAKARTA-Akhirnya, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan resmi jadi tahanan KPK, Rabu (12/7/2023). Hasbi diduga menerima suap Rp 3 miliar terkait pengaturan vonis di MA

"DTY (Dadan Tri Yudianto) membagikan kemudian menyerahkan kepada HH (Hasbi Hasan) besaran diterima HH kurang lebih sekitar Rp 3 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Firli mengatakan kasus ini berawal dari laporan pidana serta gugatan perdata yang diajukan debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka, di Pengadilan Negeri Semarang. Firli mengatakan Heryanto tak puas atas putusan PN Semarang yang membebaskan seorang terdakwa bernama Budiman Gandhi Suparman.

Heryanto pun memerintahkan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera, untuk mengawal kasasi yang diajukan jaksa ke MA. Firli menyebut Heryanto juga menghubungi mantan komisaris salah satu anak usaha BUMN bernama Dadan Tri Yudianto saat proses kasasi berlangsung.

Singkat cerita, Dadan bersedia membantu mengawal proses kasasi dengan syarat pemberian fee kepada beberapa pihak yang dianggap punya pengaruh di MA. Firli mengatakan Dadan menghubungi Hasbi dan menyampaikan permintaan untuk mengurus putusan kasasi agar sesuai dengan keinginan Heryanto Tanaka.

"Dalam komunikasi itu, HH (Hasbi Hasan) sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara HT

(Heryanto Tanaka)," ucap Firli.

Putusan kasasi pun akhirnya sesuai yang diinginkan Heryanto, yakni Budiman Gandhi dinyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun penjara. Firli mengatakan putusan itu muncul atas 'pengawasan' Hasbi Hasan dan Dadan.

"Sekitar periode Maret 2022 sampai dengan September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT (Heryanto Tanaka) pada DTY (Dadan Tri Yudianto) sebanyak 7 kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar," ucap Firli. Dadan kemudian membagi-bagi uang itu, termasuk jatah Hasbi senilai Rp 3 miliar.

KPK juga mengungkap kode-kode dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka. Kode itu diduga digunakan untuk meminta duit demi mengurus perkara kasasi.

Firli menyebutkan Dadan akan mengawal proses kasasi dengan pemberian fee atau 'suntikan dana'. "Ada kesepakatan antara HT dengan DTY, yang berikutnya DTY juga akan turut mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian fee memakai sebutan 'suntikan dana'," ucapnya.

Firli mengungkap ada beberapa skenario yang muncul usai komunikasi intens antara Heryanto dan Dadan. Salah satunya diberi kode 'jalur atas dan jalur bawah'. "Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP, terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan menggunakan istilah 'jalur atas dan jalur bawah' yang dipahami dan disepakati keduanya berupa pe-

nyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu di antaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung," ucap Firli.

MA Hormati Proses Hukum

Terpisah, Mahkamah Agung memastikan tidak akan melakukan intervensi di kasus Hasbi Hasan. Mahkamah Agung juga menilai penahanan kepada Hasbi Hasan merupakan kewenangan KPK sebagai bagian dari proses penyidikan perkara.

"Terkait penahanan terhadap Sekma Prof Hasbi Hasan SH MH, Mahkamah Agung tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK termasuk penggunaan kewenangannya untuk melakukan penahanan di tingkat penyidikan," kata Jubir MA Suharto kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Hasbi Hasan dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pengaturan vonis di MA. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus suap pengurusan perkara di MA yang sedang diusut KPK. Sudah ada dua Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, yakni Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimiyati serta beberapa ASN di lingkungan MA.

Hasbi Hasan diduga terkait aliran uang suap sebesar Rp 11,2 miliar di MA. Ia diduga menerima uang itu melalui perantaranya, yakni Dadan Tri Yudianto, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan KPK.

Sebagai tersangka penerima suap,

Hasbi Hasan dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hasbi sempat melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas status tersangkanya tapi ditolak. Sekarang, Hasbi Hasan cuti sebagai Sekma MA hingga September 2023. Posisinya digantikan sementara oleh Sugiyanto, Kepala Badan Pengawasan (Kabawas MA). (wid,ant,rls/dya)

TENTANG HASBI HASAN

HARTANYA

- Terakhir kali melaporkan LHKPN di tahun 2019.
- Jabatan Hasbi Hasan kala itu masih sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung

Di tahun itu kekayaannya tercatat di angka

- Rp 2.479.797.489. Rinciannya:
 - Berupa tanah dan bangunan di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Nilai aset itu Rp 1.720.360.000.
 - Memiliki dua mobil dan satu motor. Total kekayaan kendaraannya Rp 405.000.000.
 - Memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 78.500.000.
 - Memiliki kas dan setara kas senilai Rp 275.937.489.

PENDIDIKAN TINGGI

- UIN Syarif Hidayatullah (S3 bidang pengkajian Islam)
- STIH IBLAM (S2 bidang hukum ekonomi dan bisnis)
- IAIN Raden Intan (S1 bidang syariah)

RIWAYAT JABATAN

- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Kepala Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu
- Direktur Pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKADEMIS

- Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan
- Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mastal Mutsammid (1991-1992)
- Dosen Politeknik Manufaktur Timah, Bangka-Belitung (1996-1998)
- Dosen Ma'had 'Aly Ashiddiqiyah, Jakarta (2009-sekarang)
- Dosen Pascasarjana IAIN Raden Intan (2009-sekarang)
- Dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya
- Guru Besar Universitas Lampung

LAINNYA

- Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan
- Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Legalitas



Pertanyakan Mandeknya RUU Perampasan Aset Komisi III Sebut Tunggu Restu Pimpinan DPR

JAKARTA-Sudah dua bulan lebih Surat Presiden (Surpres) yang meminta DPR membahas bersama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dikirim ke parlemen. Sayangnya hingga kini belum ada sinyal pembahasan.

Komisi III DPR sendiri mengaku siap. Namun dengan 'garis bawah', apabila ditugaskan pimpinan DPR. "Kalau kami ini kan pasukan siap saja, kalau dimasukkan ke Pansus (panitia khusus) atau Panja (panitia kerja) ya kita siap membahasnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Habiburokhman yang baru diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR pada Selasa 4 Juli itu, mengatakan pihaknya tidak mengetahui alasan pimpinan DPR belum juga menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR untuk membahas RUU tentang perampasan aset itu. "Saya sedang dalam waktu penyesuaian, kalau ditugaskan ya kami (Komisi III) laksanakan," ujarnya.

Dia belum dapat memastikan pula kapan pembahasan RUU tentang perampasan aset itu akan mulai digulirkan di DPR RI. "Saya enggak tahu (masa) persidangan kapan, tapi kalau begitu ada penugasan, saya sih siap-siap saja," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan belum dibahasnya RUU Perampasan Aset oleh DPR, setelah menerima surat presiden (Surpres) beberapa waktu lalu. "DPR sedang memfokuskan untuk bisa menyelesaikan RUU yang ada di komisi masing-masing, maksimal dua RUU diselesaikan dalam satu tahun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/7/2023).

Beberapa waktu lalu, Puan mengakui DPR telah menerima Surpres terkait RUU Perampasan Aset. "DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kami bahas sesuai mekanisme," katanya di Jakarta, Selasa 16 Mei.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan Surpres mengenai RUU tentang perampasan aset telah dikirimkan kepada DPR, yang diterima pada Kamis, 4 Mei 2023. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Perintah Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset, terkait dengan tindak pidana. Surpres tersebut telah dikirim ke DPR pada Kamis, 4 Mei 2023.

Sesuai mekanisme, Surpres itu dilaporkan terlebih dahulu dalam rapat paripurna, sebelum dibawa ke dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR.

Hampir senada, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus menyebut



(Ilustrasi) Satgas BLBI saat menyita aset milik PT Intercon Enterprises senilai Rp1 triliun di Meruya, Jakarta Barat.(dok)

lembaga legislatif itu masih perlu membahas lebih mendalam untuk menyamakan pendapat masing-masing fraksi sehingga tidak ada penolakan nantinya.

"Kita kan ada dinamika coba, katakan ada SOP kita yang bagaimana menuju ke sana. Kalau ini katakan sembilan fraksi belum kompak bagaimana kita mau kelola ya. Itu dulu yang harus disatukan," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen.

Dia mengatakan Komisi III DPR RI sedang fokus membahas permasalahan dalam rancangan undang-undang itu. Pimpinan DPR pun ingin RUU bisa diselesaikan maksimal dua tahun beserta tata tertibnya setiap tahun.

Dinanti Satgas BLBI

RUU Perampasan Aset penting salah satunya untuk menuntaskan pengejaran obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini mangkir dan belum melunasi utang.

"Ini nanti kalau ada UU Perampasan Aset gampang," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4/2023)

Diketahui, data terbaru menyebutkan Satgas BLBI baru berhasil menghimpun utang negara dari kasus BLBI senilai Rp 30 triliun. Padahal total target utang yang harus ditagihkan ada sekitar Rp 110 triliun.

Mahfud MD yang merupakan Ketua Pengarah Satgas BLBI mengungkapkan sederet masalah dihadapi Satgas BLBI dalam rangka menagih hak negara dari kasus BLBI. Misalnya saja beda hitungan antara obligor dengan pemerintah.

"Sekarang masuk ke fase kompleks masalahnya ada perbedaan hitungan antara yang kami miliki dengan klaim

obligor yang mau bayar. Misalnya kami katakan ini punya utang Rp 5 triliun, tapi dia katakan cuma Rp 4 triliun. Ini juga menghambat," ungkap Mahfud ditemui di kantornya, bilangan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

"Kalau kami langsung setuju kan nggak boleh juga, kalau kami nunda terus dia nanti nggak mau bayar. Ini sedang dicarikan jalan keluar," katanya lagi

Bukan cuma itu, dari temuannya mulai banyak obligor yang mengalihkan asetnya. Mulai dari dialihkan ke saudara dan keluarga dekat, hingga dipindahtangankan dengan cara dijual. "Kemudian ada juga obligor yang alihkan asetnya ketika masalah ini masih mengambang, berpindah ke saudara, anak, atau berpindah dijual ke orang lain. Ada yang juga menetap di luar negeri," sebut Mahfud.

Mahfud memaparkan pihaknya saat ini mulai mencari cara yang lebih ekstrem untuk menagih utang obligor BLBI. Salah satu caranya adalah dengan pemberian sanksi, hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Sanksinya pun beragam mulai dari pencabutan paspor, menutup akses perbankan, pembatasan izin bisnis, hingga pembekuan rekening bank.

Satgas BLBI sendiri rencananya bakal diperpanjang masa tugasnya. Satuan tugas itu akan selesai masa kerjanya akhir tahun ini. "BLBI insyaallah diperpanjang karena penting, sekurang-kurangnya perpanjangan itu bukan lagi menagih, tapi menentukan posisi hukum bagi masing-masing obligor yang ngemplang," ungkap Mahfud.

Dia menyebut tagihan tetap akan dilakukan, namun ke depannya status hukum bakal melekat erat kepada para

obligor. "Tagihan akan dilakukan, tapi ketika perpanjangan kita akan nyatakan mereka berutang sekalian dan harus diburu oleh negara," sebut Mahfud.

Untuk diketahui, Satgas BLBI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 pada 4 Juni 2021. Inti dari tugas Satgas BLBI yang merupakan koordinasi lima kementerian ditambah dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI ini adalah mengeksekusi aset dari kasus BLBI yang nilainya mencapai Rp 110,45 triliun selama 2,5 tahun hingga 31 Desember 2023. (wid,rls,ist/dya)

KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN SEKTOR KASUS KORUPSI 2022

Perdagangan Rp 29.963 miliar	Investasi & Pasar Modal Rp 123,9 miliar
Transportasi Rp 8.829,8 miliar	Sosial Kemasyarakatan Rp 116,2 miliar
Sumber Daya Alam Rp 6.991,9 miliar	Kebencanaan Rp 94,5 miliar
Argaria Rp 2.660,5 miliar	Keagamaan Rp 77,3 miliar
Utilitas Rp 982,7 miliar	Kesihatan Rp 73,9 miliar
Perbankan Rp 516,3 miliar	Kepemudaan & Olahraga Rp 46,3 miliar
Pertahanan & Keamanan Rp 453,1 miliar	Kepemiluan Rp 26 miliar
Desa Rp 381,9 miliar	Kebudayaan & Pariwisata Rp 20,5 miliar
Pemerintah Rp 238,9 miliar	Komunikasi & Informasi Rp 20,4 miliar

Akibat Bencana, 18 Infrastruktur di Lumajang Rusak Berat



Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat meninjau lokasi bencana. (foto dok kominfo Lumajang)

LUMAJANG - Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan bahwa sebanyak 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah telah mengalami kerusakan berat akibat bencana alam banjir lahar dingin Gunung Semeru dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Kami meminta dukungan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Lumajang, Rabu (12/7/2023).

Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq menyampaikan laporan terkait kerusakan dan progres penanganan bencana kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Selasa (11/7).

"Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana terjadi," tuturnya.

Cak Thoriq juga menandakan bahwa jembatan adalah salah satu infrastruktur kerakyatan untuk memperlancar mobilitas dan memangkas waktu tempuh antar wilayah, yang sebelumnya harus memutar jauh karena terpisah oleh kondisi geografis, seperti lereng, bukit, jurang, ataupun sungai.

"Adanya jembatan dapat mempermudah mobilitas masyarakat untuk aktivitas perekonomian, sehingga jika terjadi kerusakan, maka dibutuhkan penanganan atau perbaikan secara prioritas," ungkap Cak Thoriq saat didampingi Sekretaris Daerah, Agus Triyono saat meninjau jembatan putus akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, pada beberapa titik di

wilayah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (10/7/2023) sore.

Cak Thoriq juga mengungkapkan, bahwa peninjauan tersebut dilakukan, karena salah satu jembatan yang terputus merupakan akses penghubung dua kabupaten, yakni Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

"Hari ini saya meninjau secara langsung beberapa jembatan putus yang ada di Pronojiwo, salah satunya jembatan penghubung antara Lumajang - Malang yang selama ini menjadi akses untuk aktivitas perekonomian masyarakat," terangnya.

Selain itu, diungkapkan Cak Thoriq, bahwa terkait jembatan yang menghubungkan Lumajang - Malang akan secepatnya ditangani oleh Kementerian PUPR dengan anggaran PUPR. Selebihnya, akan dikerjakan oleh Pemkab Lumajang yang bekerja sama dengan BNPB, termasuk jembatan skala kecil juga akan dikerjakan oleh Pemprov Jatim.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga meninjau jembatan Kalibiru penghubung antara Dusun Darungan Desa Pronojiwo dengan Dusun Kebonsenin Desa Sidomulyo, serta jembatan Supit Timur Desa Pronojiwo yang terputus akibat diterjang banjir. =

Dihari yang sama, Cak Thoriq juga menyerahkan bantuan santunan kepada ahli waris dari tiga korban yang merupakan satu keluarga meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Sriti, Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah pusat secara penuh akan

mendukung upaya-upaya yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan darurat hingga pemulihan berdasarkan kebutuhan warga terdampak.

"Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur, dan unsur Forkopimda dapat merinci secara detail segala dampak kerusakan di lapangan, termasuk semua kebutuhan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya," katanya.

Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 18 obyek infrastruktur yang telah rusak, lanjut dia, pihak BNPB meminta segera diinventarisasi kebutuhan dan pelaksana agar jelas sesuai ketentuan, sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan antar lintas sektor.

Ada lima jembatan putus yang diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru yakni jembatan penghubung Desa Kloposawit dengan Tumpeng, kemudian jembatan Kaliregoyo penghubung Desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan.

Selanjutnya jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang, jembatan Limpas Penghubung Desa Tumpeng dan Desa Nguter, dan jembatan Kalibiru penghubung Desa Sidomulyo dengan Desa Pronojiwo.

Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Kabupaten Lumajang yang dikerjakan secara kolaborasi antara APBN, APBD I dan APBD II.

Kabupaten Lumajang menangani dua jembatan yang akan dibiayai oleh BNPB, kemudian dua jembatan dikerjakan oleh Pemprov Jatim dan Kementerian PUPR dengan anggaran APBN melaksanakan pembangunan

kembali Jembatan Glidik 2 di jalan nasional yang menghubungkan Lumajang dengan Malang.

Sementara itu, Sebagian warga terdampak banjir lahar Semeru dan tanah longsor di beberapa wilayah bagian selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang mengungsi, kini mulai kembali ke rumah masing-masing. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Nugraha Yudha M, saat dimintai keterangan melalui telepon selulernya, Rabu (12/7/2023).

Menurut Yudha, kondisi wilayah yang sudah berangsur membaik pasca diterjang banjir lahar dingin semeru tersebut, menjadi salah satu alasan masyarakat untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kepulungan masyarakat difasilitasi oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

"Hari ini, kita bantu warga yang akan pulang ke rumahnya masing-masing. Kita gunakan satu armada elf dan dua aramba dari Satpol Pol PP, ada satu truk dan satu mobil patroli, juga ada satu truk milik bagian umum," terangnya.

Ia menambahkan, bahwa proses pemulihan warga, sementara untuk pengungsi yang berada pada posko pengungsian di Balai Desa Jarit dan Balai Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Para pengungsi kebanyakan berasal dari Desa Jugosari dan Sumber Kajar.

Sementara, untuk pengungsi yang di Desa Nguter sudah banyak yang telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah.

Di sisi lain, Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang juga masih melakukan pendataan terkait jumlah pengungsi yang masih bertahan di titik posko pengungsian. (lut/dya)



Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana terjadi,"

THORIQU L HAQ
BUPATI LUMAJANG



Perlu Duduk Bersama Guna Antisipasi Pungli Sekolah

SURABAYA - Pakar pendidikan asal Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Muchlas Samami menyarankan perlunya duduk bersama menemukan solusi dan jalan keluar terkait keuangan sekolah sehingga tidak ditemui dugaan pungutan liar, khususnya yang berstatus negeri.

TMUBK adalah tes penerimaan ma"Dinas Pendidikan, guru, dan komite atau wali murid harus duduk bersama membicarakan bagaimana kondisi keuangan, lalu bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Katakanlah kemudian memerlukan dukungan dari masyarakat disepakati bersama. Kalau seperti itu jatuhnya bukan pungli," ujarnya dikutip dari antara, Rabu (12/7/2023).

Menurut Prof Muchlas, ada banyak kemungkinan kenapa sekolah masih melakukan pungli sehingga pemerintah daerah juga tidak bisa menutup mata, sebab terkadang ada hal dilematis yang dialami pihak sekolah.

Di satu sisi, kata dia, tidak boleh melakukan penarikan biaya, tapi anggaran dari pemerintah setempat yang diberikan kepada pihak sekolah tidak dapat mencukupi kebutuhan.

"Biasanya kalau dihadapkan dengan keadaan tersebut, sekolah mencari cara untuk mengumpulkan dana. Misalnya, mencari dana lewat komite sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau idenya infaq, saya tidak sependapat karena itu berhubungan dengan agama," ucap Prof Muchlas.

"Infaq itu sumbangan tak mengikat dan memaksa, kalau ditentukan besarnya, ya itu bukan infaq namanya. Kalau infaq, mau tidak mau terserah orangnya dan tidak memaksa," katanya menambahkan.

Prof Muchlas juga mengapresiasi sikap tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membeastugaskan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, karena dugaan pungli. Kasus tersebut mencuat saat Gubernur Ganjar menerima aduan dugaan praktik pungli berkedok infaq setiap kenaikan kelas.

Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) lalu. Seminar itu dihadiri pelajar dan mahasiswa calon penerima beasiswa pendidikan dari Pemkab Rembang. Saat itulah, Ganjar menerima aduan tentang adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli). Dugaan pungli itu terjadi di SMK Negeri yang ada di Kabupaten Rembang, dengan kedok pembayaran infak.

Mulanya Ganjar memanggil sejumlah peserta seminar, untuk naik ke panggung. Setidaknya ada lima orang yang maju ke panggung, untuk diajak berdialog dengan Ganjar. Kelima anak itu berasal dari keluarga nelayan, buruh, dan guru honorer. Ganjar kemudian mulai bertanya ke



Ilustrasi protes terhadap pungli di sekolah.

masing-masing anak. Mulai dari asal usul keluarga, pekerjaan orangtua masing-masing, sampai pada biaya sekolah gratis.

Pada saat itulah, Ganjar menemukan dugaan pungli berkedok infak yang dipungut dari pelajar. Hal tersebut, ia dengar langsung dari siswa yang ia undang naik ke atas panggung. Ditemui usai acara, Ganjar mengaku senang karena masih ada siswa yang berani, dan jujur mengatakan di sekolahnya masih ada pungutan liar. Menurut Ganjar, hal itu adalah sikap kejujuran yang patut untuk dihargai.

"Nah ini masih ketahuan. Saya senang sekali karena ada siswa yang mau mengaku. Bayar nggak sekolahnya, dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam. Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung. Masak membayar sih? Infak pak," kata Ganjar usai acara, dikutip dari okezone.com.

Terkait dengan temuan tersebut, Tindakan tegas telah diambil terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, terkait tarikan atau pungli berkedok infak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.

"Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Ganjar tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.

"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.

Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut menurut Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar berhati-hati. Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

"Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan," jelasnya.

Bagi Ganjar masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.

"Ada beberapa sekolah cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh tapi bukan siswa, kasihan siswanya," tandasnya.

Ganjar menambahkan, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.

"Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat. Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui

komite sekolah.

Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," kata Uswatun dikutip dari sursa.

Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan tersebut saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus. "Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.

Kepala SMKN 1 Sale tersebut saat ini ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh)

Sementara itu, upaya antisipasi pungli sekolah juga dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka gencar mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD - SMA sederajat.

Hal tersebut dilakukan karena antisipasi akan terjadinya Pungutan Liar (Pungli) yang menjanjikan bisa masuk di sekolah-sekolah favorit, atau adanya indikasi kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat.

"Seperti kasus pungutan pemesanan atribut sekolah atau sejenisnya, dikhawatirkan dilakukan oleh oknum pihak sekolah," kata Wakil Ketua 2 PMII Bangkalan, Samsul Anwar, dikutip kabarmadura Rabu (12/7/2023).

Dia menjelaskan, kader PMII tidak menginginkan pendidikan di Bangkalan hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Namun, orang menengah ke bawah dan pengetahuannya di atas rata-rata harus diperhatikan.

"Kami yakin pihak sekolah sudah tahu mekanisme PPDB. Kami harap aturan dan tahapan yang ditentukan dilaksanakan dengan baik," kata dia.

Sementara ketua PC PMII Bangkalan, Syamsul Hadi mengingatkan bahwa pengawalan PPDB tidak hanya dalam berkaitan pada kebijakan saja. Namun selain itu, kader PMII harus ikut mendampingi hingga tuntas. (Lut/dya)



HAPPY ASMARA

Bawakan Lagu 'Pamer Bojo'

HAPPY Asmara tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik usai Denny Caknan mengumumkan pernikahannya dengan Bella Bonita pada Jumat (7/7/2023) lalu. Banyak yang menduga Happy Asmara terpuruk atas pernikahan mantan kekasihnya itu.

Sontak saja apapun yang dilakukan Happy Asmara menjadi sorotan publik.

Salah satunya saat Happy Asmara mengisi sebuah acara pada Sabtu (8/7) kemarin. Terlihat dalam unggahan akun TikTok @reddno19kebumen, Happy Asmara membawakan lagu Pamer Bojo.

Happy Asmara menyebut lagu tersebut dipersembahkannya untuk orang yang baru saja menikah.

"Lagu Pamer Bojo spesial untuk yang baru nikah," ujar Happy Asmara dilansir dari unggahan TikTok @reddno19kebumen.

Sontak saja penonton langsung bersorak usai mendengar ucapan Happy Asmara tersebut.

Meski Happy Asmara tidak menyebutkan siapa orang baru menikah yang dimaksudnya tapi penonton menduga lagu tersebut ditujukan untuk mantan kekasihnya, Denny Caknan.

Selain itu, saat Happy Asmara membawakan lagu Rungkad, banyak penonton yang berteriak jika ia tengah mencurahkan isi hatinya yang ditinggal nikah oleh Denny Caknan.

Sontak saja potongan video aksi panggung Happy Asmara menyanyikan lagu Rungkad itu langsung dibanjiri beragam komentar warganet.

Banyak dari mereka yang menyebut dengan nikahnya Denny

Caknan, karier Happy Asmara semakin melejit.

Happy Asmara adalah penyanyi dangdut dan koplo yang terkenal lewat lagu "Tak Ikhlasno".

Happy Asmara bernama asli Heppy Rismanda Hendranata. Lahir di Kediri, 10 Juli 1999.

Sulung dari empat bersaudara ini menempuh pendidikan tinggi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka di Malang sejak 2017 hingga 2022 dan belum lulus.

Perjalanan karier

Ketika usia SMA, Happy Asmara sudah aktif menjadi penyanyi lokal Jawa Timur, dari festival, acara pernikahan, hingga orkes dangdut.

Pada 2016 ia mengikuti audisi ajang D'Academy musim 4 dan mendapatkan golden ticket dari juri Dewi Perssik. Namun ia gagal lolos ke tahap selanjutnya karena tidak mengangkat telepon dari pihak penyelenggara gara-gara takut itu adalah penipuan.

Tahun 2020 lagu-lagunya banyak dipakai di TikTok yang membuat popularitasnya meningkat.

Kehidupan pribadi

Oktober 2022, Happy Asmara

putus dari Denny Caknan setelah dua tahun pacaran.

Selama masa pacaran mereka beberapa kali putus nyanbung. Kendati demikian mereka juga sempat memiliki rencana untuk me-nikah.

Tinggal di Kediri, rumah Happy Asmara begitu asri. Sempat beredar video penampakan rumahnya di TikTok, kediaman Happy Asmara dipuji warganet (berbagai sumber)

DISKOGRAFI

"Salah" (2019)

"Tak Ikhlasno" (2019)

"Balik Kanan Wae" (2019)

"Ojo Geton" (2019)

"Kebal Kelaran" (2020)

"Sampun Lilo" (2020)

"Bahagiamu" (2020)

"Iri Bilang Boss" (2020)

"Wes Tatas" (2020)

"Purik" (2020)

"Ojo Dadi Pecundang" (2021)

"Tak Warahi Carane" (2021)

"Siji Waktu" (2021)

"Cukup" (2022)

"Tukangku Sayang" (2022)

"Tanpo Aku (Sing Ati-ati)" (2022)

"Suwun Lorone" (2022)





DAMPAK TIDUR KURANG DARI ENAM JAM SETIAP HARI

TIDUR kurang dari enam jam setiap hari dapat mengurangi efek perlindungan yang dihasilkan aktivitas fisik secara teratur guna melawan penurunan kognitif, menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *The Lancet Healthy Longevity*.

Dalam studi itu, para peneliti dari University College London (UCL) di Inggris seperti disiarkan *The Indian Express*, Jumat (7/7/2023) mengamati fungsi kognitif selama 10 tahun pada 8.958 orang berusia 50 tahun ke atas di Inggris. Mereka menganalisis bagaimana kombinasi kebiasaan tidur dan aktivitas fisik yang berbeda dapat memengaruhi fungsi kognitif orang dari waktu ke waktu.

Tim peneliti menemukan bahwa orang-orang yang lebih aktif secara fisik tetapi memiliki waktu tidur yang singkat yakni rata-rata kurang dari enam jam mengalami penurunan kognitif yang lebih cepat secara keseluruhan.

Temuan itu berarti setelah 10 tahun fungsi kognitif mereka setara dengan rekan-rekan yang melakukan lebih sedikit aktivitas fisik.

"Studi kami menunjukkan bahwa tidur yang cukup mungkin diperlukan bagi kita untuk mendapatkan manfaat kognitif penuh dari aktivitas fisik," kata penulis utama studi Mikaela Bloomberg dari UCL Institute of Epidemiology and Health Care. Menurut studi itu, mereka yang lebih cepat mengalami penurunan kognitif

karena tidur kurang dari enam jam berusia 50 tahun-an dan 60 tahun-an.

Tetapi, pada partisipan studi yang lebih tua (berusia 70 tahun ke atas) manfaat kognitif dari olahraga tampaknya tetap terjaga, meskipun tidurnya singkat.

Mengenai temuan itu, rekan penulis studi Profesor Andrew Steptoe dari UCL Institute of Epidemiology and Health Care mengatakan penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat melindungi fungsi kognitif di usia paruh baya dan lanjut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan aktivitas fisik dapat menjadi cara untuk mempertahankan fungsi kognitif, tetapi, intervensi juga harus mempertimbangkan kebiasaan tidur untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi kesehatan kognitif.

Para peneliti mencatat beberapa keterbatasan dalam penelitian itu karena mereka mengandalkan peserta yang melaporkan sendiri durasi tidur dan aktivitas fisik mereka yakni kurang dari enam jam, enam hingga delapan jam dan lebih dari delapan jam.

Jaga kesehatan

Terpisah, praktisi kesehatan dr. Andreas Prasadja, RPSGT mengatakan tidur dengan durasi yang cukup dan kualitas yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan, karena sistem imunitas bekerja secara optimal pada saat tidur, bukan saat terjaga.

"Kita bangun dengan rasa segar, bugar dan lebih sehat karena saat tidur-lah sistem imun bekerja secara optimal, bukan pada saat terjaga," kata dr. Andreas dalam peluncuran daring *Antangin Good Night* di Jakarta

Dalam menjaga kesehatan, tidur tidak kalah penting dari asupan nutrisi yang seimbang dan rutinitas berolahraga.

Bahkan, kata Andreas, tanpa kualitas tidur yang baik, asupan nutrisi akan sia-sia karena metabolisme tubuh bisa terganggu. Selain itu, olahraga juga bisa memperburuk kesehatan.

Dikatakannya, untuk menjaga kesehatan, bukan hanya kualitas tidur saja yang penting, durasi tidur dan kontinuitas tidur juga penting.

"Durasi tidur penting, kontinuitas tidur penting, mimpi juga penting. Yang membuat kita bangun tidak segar adalah kualitas tidur yang buruk, bukan karena teringat mimpi," kata dia.

Namun, kata Andreas, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran jam bekerja yang juga berdampak pada pergeseran jam tidur.

Semakin berkurangnya tidur, akan berakibat pada berkurangnya produktivitas, memburuknya kesehatan dan keselamatan.

"Begitu kesehatan tidur terganggu, bisa berdampak pada faktor psikologis, performa buruk, reaksi yang lamban, risiko depresi, cemas, tekanan darah tinggi, risiko penyakit jantung dan diabetes," katanya (Ant)



TEKNOLOGI LPR, SOLUSI PERPARKIRAN



TEKNOLOGI License Plate Recognition (LPR) merupakan solusi berbasis pembelajaran mesin (machine learning) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dianggap dapat meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan parkir

LPR bermanfaat untuk mengenali pelat nomor kendaraan dan mempercepat proses transaksi di gerbang area parkir sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang efisien dan cepat saat memarkir kendaraan.

"Pengguna parkir akan mendapatkan pengalaman yang lebih efisien dan cepat, karena tidak perlu mengantre lama, baik di pintu masuk maupun keluar area parkir," kata CEO Centre Park Charles Oentomo di Jakarta.

Charles menjelaskan teknologi pendeteksi pelat nomor berbasis AI juga akan meningkatkan faktor keamanan parkir karena setiap kendaraan yang masuk dan keluar area parkir akan diverifikasi.

Hal ini dimungkinkan mengingat teknologi LPR tak hanya kecocokan pelat nomor, melainkan juga akan mencocokkan jenis kendaraan, merek kendaraan, hingga warna kendaraan.

PT Centrepark Citra Corpora (Centre Park) melalui anak perusahaannya, Alfabet, terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi LPR selama lima tahun terakhir. LPR ini didukung oleh teknologi control processing unit (CPU) yang lebih sederhana dan ekonomis ketimbang graphics processing unit (GPU).

Dengan keunggulan tersebut, teknologi LPR Centrepark disebut dapat diterapkan di semua jenis kamera pemantau (CCTV) serta bersifat plug and play tanpa perlu penambahan alat lain.

"Meski teknologinya lebih sederhana, tapi kemampuan deteksinya tetap akurat dan cepat," tutur Charles.

Dia menambahkan bahwa tim Alfabet juga tengah mengembangkan fitur lokasi, di mana nantinya pengguna yang menggunakan aplikasi Parkee bisa mengetahui lokasi parkir kendaraannya. Fitur ini akan bermanfaat diterapkan di kawasan parkir gedung bertingkat, apalagi pengguna kerap lupa lokasi parkir kendaraannya.

Tak hanya dari sisi pengguna

kendaraan, penerapan teknologi LPR dapat memberi nilai tambah lain dari sisi pengelola gedung salah satunya termasuk perekaman data yang lebih baik dan akurat sehingga manajemen gedung bisa menganalisa tren traffic kendaraan.

Secara khusus, Charles mengatakan penggunaan LPR di pusat perbelanjaan akan dikembangkan menjadi sebagai sebuah sarana untuk menganalisa pengalaman perjalanan konsumen (customer journey).

"Fitur ini kami sebut sebagai shopping mall solution, di mana kami mengolah data dan membuat analisis mengenai pengalaman kunjungan konsumen, area yang paling banyak dikunjungi konsumen, hingga analisa data demografi dan emosi pengunjung," demikian kata Charles.

LPR (License Plate Recognition) atau disebut juga dengan ANPR (Automatic Number Plate Recognition) adalah salah satu aplikasi cctv untuk mengenali plat nomor kendaraan. (berbagai sumber)

PENGGUNAAN LPR DIANTARANYA

- Identifikasi plat nomor kendaraan secara otomatis oleh Polisi. Diluar negeri aplikasi ini sudah hal yang umum.
- Sistem parkir otomatis dimana pintu garasi/gerbang dapat terbuka secara otomatis hanya dengan mengenali plat nomor penghuni.
- Otomatisasi sistem Parkir pertokoan. Dengan LPR sistem dapat mencatat plat nomor mobil yang masuk secara otomatis.
- Access Control kompleks perumahan atau apartemen yang memungkinkan hanya kendaraan penghuni yang dapat masuk kompleks

HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

5 KESALAHAN INI

BIASA MENGUNDANG NYAMUK

NYAMUK yang muncul di halaman bukan kebetulan lewat melainkan mungkin saja karena sejumlah kesalahan yang dibuat pemilik rumah sekaligus halaman yang mengundang mereka datang lalu bahkan berkembangbiak.

Berikut lima kesalahan yang bisa mengundang nyamuk seperti disiarkan Real Simple.

1. Ada genangan air

Jika beberapa hari lalu hujan dan tersisa genangan air, itu bisa menyebabkan masalah munculnya nyamuk.

Hewan itu membutuhkan air untuk tiga tahap pertama siklus hidupnya bertahan hidup sehingga genangan air dapat menjadi tempat bersarang dan mendorong pertumbuhannya.

Kepala petugas pelanggan di Angi sekaligus salah seorang pendiri Angie's List Angie Hicks mengatakan jika genangan air menjadi masalah,

penting untuk sering membersihkan talang dan mengevaluasi kembali sistem drainase halaman rumah.

2. Sampah di halaman

Malas membersihkan halaman sehingga sampah termasuk dedaunan kering, puing-puing bertumpuk bisa mendatangkan nyamuk karena sampah memberi nyamuk perlindungan dari angin dan elemen lainnya.

"Itu menjadi tempat yang aman bagi nyamuk untuk bersarang dan bereproduksi. Pastikan untuk menyimpan atau membuang sampah dengan benar dan jauhkan kayu bakar dari tanah," tutur Hicks.

3. Rumput tumbuh lebat

Rumput yang tumbuh lebat dapat menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk untuk bersarang. Kombinasi genangan air dan rerumputan yang lebat memberikan nyamuk perlindungan dan nutrisi untuk bereproduksi.

Jaga kebersihan halaman dengan sering memotong rumput dan bawa profesional jika melihat masalah sistem irigasi.

4. Meninggalkan makanan

Nyamuk tertarik pada aroma manis seperti saus barbeku dan kue mangkuk yang baru saja dipanggang untuk pencuci mulut. Hicks menyarankan agar makanan tetap tertutup di luar.

Kemudian pastikan untuk membuang sisa makanan dengan benar di tempat sampah yang tertutup.

Membersihkan setelah makan di luar ruangan juga dapat menjaga halaman bebas nyamuk.

5. Terlalu banyak karbon dioksida

Nyamuk dapat mendeteksi berbagai senyawa, termasuk karbon dioksida yang artinya udara yang orang-orang hembuskan mengundang mereka ke pekarangan rumah.

Hicks menyarankan para pemilik halaman untuk menggunakan obat nyamuk yang mengandung bahan aktif yang terdaftar seperti minyak lemon eucalyptus, DEET, atau picaridin.

Kemudian pertimbangkan untuk menanam tanaman pengusir nyamuk untuk membantu mengusir serangga secara alami seperti lemon balm, lavender, citronella, catnip, marigold, basil, peppermint, rosemary, pennyroyal, dan sage yang merupakan tanaman pengusir nyamuk alami.

MALARIA

Terpisah, dokter Spesialis Anak dr Amar Widhiani mengatakan cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia menjadi favorit nyamuk malaria untuk berkembangbiak.

Amar mengungkapkan baik nyamuk *Aedes aegypti* (demam berdarah) maupun *Anopheles* (malaria) menyukai daerah tropis dan tidak dingin, karena nyamuk tersebut tidak bisa berkembangbiak di daerah dingin.

Meskipun Jakarta dan sekitarnya bukan daerah endemis, kata dia, masyarakat tetap harus waspada karena penyakit malaria bisa menular oleh beberapa faktor.

"Di daerah seperti Jakarta dan Bekasi banyak terdapat semak-semak yang menyebabkan air (mengalir) tidak lancar. Itu menjadi tempat berkembangbiak *Anopheles* dengan mudah" kata dokter yang praktek di Rumah Sakit (RS) Anak dan Bunda Harapan Kita (Ant)



Ragu Konsistensi (dari hal 1)

KPU menginformasikan adanya waktu tambahan untuk perbaikan persyaratan bakal calon anggota legislatif untuk memberikan kesempatan kepada parpol jika ada dokumen yang salah "input" dalam Sistem Informasi Pencalonan.

Kebijakan ini termuat dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 yang diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Senin (10/7/2023). "Dalam menyelenggarakan tahapan, KPU harus berkepastian hukum, kan? Nah, KPU provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP kabupaten/kota ya harus ada pedomannya, yaitu surat dinas," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, Rabu (12/7/2023).

KPU RI memberi kesempatan partai politik untuk memperbaiki berkas persyaratan pendaftaran bacaleg mereka hingga 16 Juli 2023. "Dalam hal terdapat potensi dokumen persyaratan bakal calon yang sekiranya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila dokumen tersebut tidak benar, maka KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni-9 Juli 2023," isisuratitu.

Akses Silon diberikan kepada partai politik yang telah bersurat ke KPU meminta pengajuan perbaikan dokumen. Padahal, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalegan, partai politik sudah diberikan kesempatan memperbaiki berkas persyaratan pendaftaran yang belum memenuhi syarat verifikasi administrasi pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu 2024 juga sudah menyerahkan perbaikan itu pada 9 Juli 2023.

Dalam kesempatan kali ini, KPU RI meminta jajarannya di daerah meng-"unlock" fitur hasil pemeriksaan perbaikan partai politik peserta pemilu dan memberi "status pengembalian" di Silon sampai 16 Juli 2023. KPU daerah diminta memastikan bahwa perbaikan pada kesempatan ini betul-betul hanya perbaikan dokumen, bukan penggantian bacaleg yang sebelumnya sudah diizinkan pada masa perbaikan 26 Juni-9 Juli 2023.

KPU daerah juga diminta mengingatkan partai politik melakukan submit perbaikan setelah mengganti dokumen di Silon. Setelahnya, KPU daerah diminta melakukan analisis kegandaan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen yang terakhir diganti. KPU RI meminta, pengajuan perbaikan kembali ini tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 423 Tahun 2023, dan persuratan lainnya dari KPU terkait pencalegan.

Sebelumnya, KPU RI juga memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan atau pergantian bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Pergantian bacaleg itu bisa dilakukan saat masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS).

"Di masa pencermatan daftar calon sementara atau DCS, kami berikan kesempatan kepada partai politik melakukan penggantian bakal calon anggota legislatif," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Idham menuturkan di masa masukan dan tanggapan masyarakat serta pencermatan DCT pun, parpol masih dapat mengganti bacalegnya. Namun, kata Idham, hal itu dapat dilakukan dengan persetujuan dari pimpinan parpol.

"Di masa pencermatan DCT, daftar calon tetap pun masih memungkinkan pergantian calon anggota legislatif, asal mendapat persetujuan pimpinan parpol tingkat nasional," jelasnya.

Bawaslu Diminta Telusuri

Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan penelusuran. "Bawaslu perlu menelusuri soal perpanjangan jadwal ini agar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu bisa ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan," kata Dewan Pengawas Perludem Titi Anggraini, Rabu (12/7/2023).

Titi berharap, jangan sampai aturan yang sudah ditetapkan, dapat semena-mena dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab hal ini juga jadinya jadi bukti KPU sebagai lembaga yang tidak kredibel.

"Jangan sampai aturan main dibongkar pasang tanpa kredibilitas dan akuntabilitas yang menopangnya. Akhirnya pemilu yang berkepastian hukum menjadi terciderai dan prosedur pemilu menjadi tidak terukur dalam implementasinya," tuturnya.

"Tentu pergantian jadwal secara tidak akuntabel merupakan gangguan serius terhadap praktik pemilu demokratis yang berkepastian hukum," Titi menambahkan.

Sebagai informasi, parpol peserta pemilu telah menyelesaikan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang di mana waktu untuk perbaikan adalah dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

Harusnya sesudah itu KPU mulai melakukan proses verifikasi administrasi atas dokumen perbaikan hingga 6 Agustus mendatang. Baru kemudian KPU akan mengumumkan penetapan daftar calon sementara (DCS) pada dari 19 hingga 23 Agustus 2023 mendatang.

Sebelumnya, KPU memberi kesempatan kepada parpol peserta pemilu melakukan perbaikan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon. Batas akhirnya adalah Minggu (9/7/2023) pukul 23.59 waktu setempat.

Untuk diketahui, diketahui hanya 10,29 persen bakal calon yang melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran. Sedangkan 9.260 dari

10.323 yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg belum memenuhi syarat (BMS). Dari total bakal caleg yang BMS ini, juga ada 300 bakal caleg yang punya data ganda.

Di sisi lain, memperpanjang masa perbaikan berkas persyaratan bacaleg selama sepekan menandakan beberapa hal. Salah satunya ketidaksiapan partai politik dalam proses rekrutmen bacaleg. "Dan kurangnya KPU dalam menyosialisasikan persyaratan dokumen bakal calon kepada peserta pemilu," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).

Mita berpendapat kurangnya sosialisasi dari KPU ke partai politik tercermin dari banyaknya dokumen persyaratan bacaleg yang belum memenuhi syarat pada tahap verifikasi dokumen administrasi. Sebelumnya, masa perbaikan berkas bacaleg berlangsung pada 26 Juni-9 Juli 2023.

Jadwal itu telah ditetapkan KPU dalam Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai pencalegan. Belakangan, KPU menambah waktu perbaikan dokumen persyaratan sampai 6 Agustus 2023 lewat surat yang diajukan ke KPU daerah maupun pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024.

Mita melihat ketidakconsistenan KPU tidak hanya terjadi pada perpanjangan masa perbaikan berkas pencalegan, tapi juga tahapan-tahapan sebelumnya. JPPR, lanjut dia, mendorong Bawaslu turun tangan.

"Kalau kemarin Bawaslu tegas menindak perpanjangan pengajuan bakal calon dengan upaya penanganan pelanggaran administrasi pemilu, seharusnya Bawaslu juga konsisten dalam menanggapi perpanjangan perbaikan dokumen bakal calon ini," ujar Mita.

Cegah Kebocoran Data

Di sisi lain, Satuan Tugas Pemilu di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menguji sistem elektronik di KPU demi mencari celah sekaligus mencegah kebocoran data Pemilu 2024.

Juru bicara BSSN Ariandi Putra menyebut satgas ini beroperasi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi kita punya Satgas Pemilu yang sudah bekerja sejak awal tahun. Jadi nanti selesai pekerjaannya setelah ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi satgasnya cara kerjanya sama seperti satgas KTT ASEAN, satgasnya G20," ujar dia, di acara Indonesia Waspada, Kenali Ancaman Digital di Indonesia bersama AwanPintar, di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Satgas ini dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polri dan TNI. Satgas Pemilu sendiri disebut berjumlah 171 orang yang seluruhnya terdiri dari staf internal BSSN. Institusi ini berfungsi memperkuat sistem, melakukan pencegahan dini, dan melakukan asistensi.

"Jadi kita seperti orang yang melihat secara utuh dari luar terkait sistem elektronik itu kita uji dan kita lakukan IT Security Assessment (ISA). Setelah itu laporan lengkapnya kita sampaikan ke KPU," tuturnya. "Setelah itu kita sampaikan ternyata ada beberapa titik kerawanan atau kerentanan. Setelah itu kita harapkan KPU memperbaiki," pungkasnya.

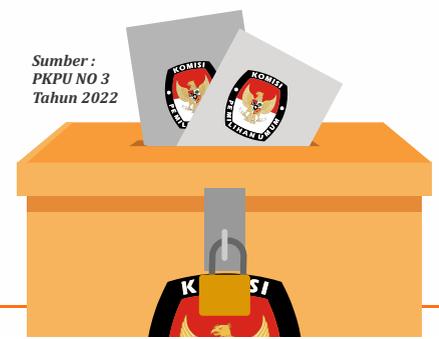
Selain itu, satgas ini sudah membangun Computer Security Incident Response Team (CISRT) bersama dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Mungkin tahun ini tim teknis kita paling sering datang ke instansi adalah ke KPU. Kita sering bolak-balik," jelas Ariandi.

"Kita temukan kerentanan, kita perbaiki, kita temukan kerentanan, kita perbaiki. Kerentanan ini dapatnya dari National Security Operation Center (NSOC) kita di Ragunan," imbuhnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

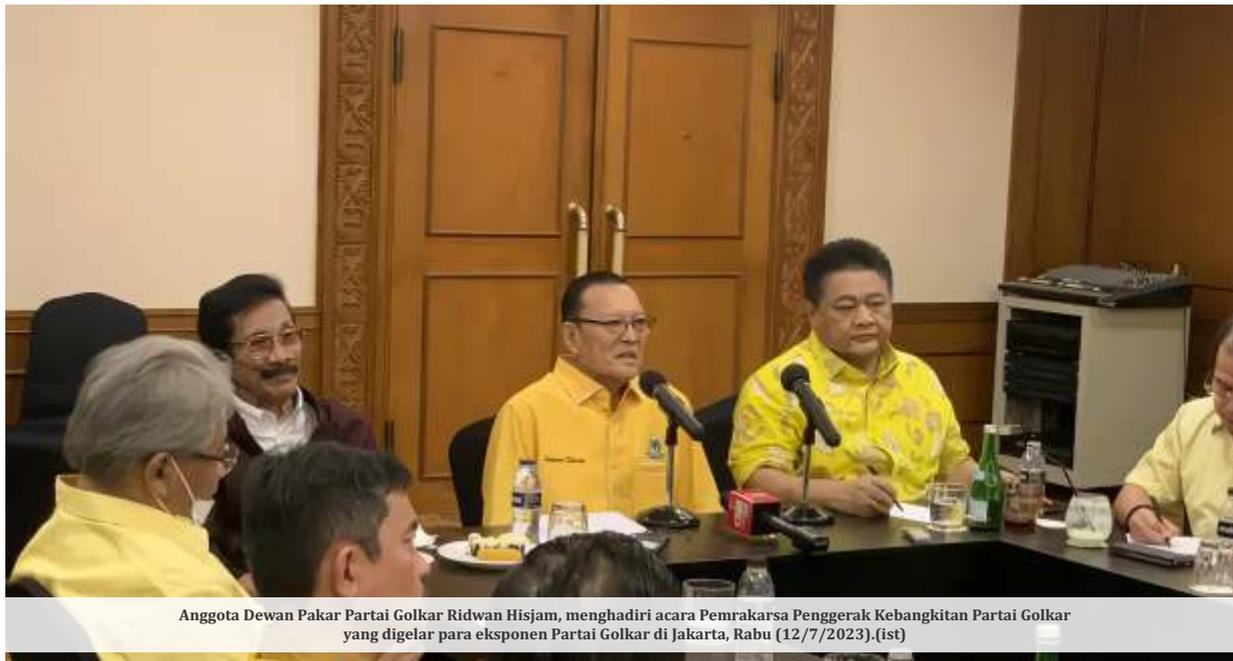
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

	4 Juni 2022 - 14 Juni 2024 Perencanaan Program dan Anggaran
	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023 Penyusunan Peraturan KPU
	14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
	29 Juli 2022 - 13 Desember 2022 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
	14 Desember 2022 - 14 Februari 2022 Penetapan Peserta Pemilu
	14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
	6 Desember 2022 - 25 November 2023 Pencalonan DPD
	24 April 2023 - 25 November 2023 Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
	19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
	28 November 2023 - 10 Februari 2024 masa Kampanye Pemilu
	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 Masa Tenang
	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara
	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota Penguapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi Penguapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
	1 Oktober 2024 Penguapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
	20 Oktober 2024 Penguapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil

Sumber :
PKPU NO 3
Tahun 2022



Tokoh Senior Desak Munaslub Ganti Airlangga, Golkar Terbelah?



Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, menghadiri acara Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang digelar para eksponen Partai Golkar di Jakarta, Rabu (12/7/2023). (ist)

JAKARTA-Mendekati Pemilu 2024, gonjang-ganjing menerpa Partai Golkar. Senior partai 'Pohon Beringin' yang mengatasnamakan 'Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar' berkumpul dan membuat pernyataan soal Ketua Airlangga Hartarto perlu diganti lewat Munaslub. Airlangga dinilai sudah tak mampu membesarkan Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Waketum Organisasi sayap Partai Golkar, DEPINAS SOKSI, Lawrence Siburian di Hotel Sultan, Rabu (12/7/2023). Turut hadir sejumlah kader senior Golkar seperti Anggota Dewan Pakar Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Ridwan Hisjam hingga tokoh MKGR, Zainal Bintang.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam munas, rapim, sudah putus Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana, sabar tunggu waktunya," kata Lawrence.

"Maaf kita ini semua orang yang sehat, nalar, waras, dan bisa melihat fakta analisis keadaan dan punya harapan. Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita lihat survei Golkar berbagai lembaga udah turun nomor 4 atau 5. Di 2024 bisa turun lagi 5, 6, 7 jadi partai burem. Kami tidak ingin itu," imbuh dia.

Lawrence memandang Airlangga tak berhasil membagi waktu sebagai menteri dan ketum. Selain itu, Airlangga juga dinilai hanya memberikan kesempatan dan posisi bagi orang-orang terbatas. "Kita lihat Pak Airlangga kepemimpinan seperti itu. Dan Pak Airlangga hanya beri kesempatan ke orang sekitarnya. Ini juga kurang bagus. Golkar terdiri dari pendiri dan yang didirikan. Dia harus beri perhatian, waktu, dengarkan,

bantu 3 organisasi pendiri dan 5 yang didirikan. Belum di luar itu ada kelompok pemegang kekuasaan di Golkar," ungkap dia.

Sebagai capres Golkar, Airlangga pun dipandang hanya melempar janji kosong. "Paling sedih katakan koalisi ini itu padahal capres (potensial) ada 3. Partai udah habis bentuk koalisi. Tinggal PAN tapi kita tahu PAN arah ke mana. Dari segi elektabilitas Pak Airlangga 1%. Siapa yang mau koalisi dengan elektabilitas 1%. Pak Ganjar, Prabowo, Anies, 20-30%, enggak ada yang 50%. Ditambah Pak Airlangga, enggak menang lah," ujar dia.

"Kita yang sehat (lihat) ini kok kita kayak dianggap orang bodoh, enggak bisa hitung, enggak ngerti politik. Motifnya apa? Kelihatannya ulur waktu saja supaya dia selamat. Tapi tunggu dulu, beliau diputuskan capres munas rapim, kita tuntutan pertanggungjawaban. Kita minta rapimnas dan munas ganti Pak Airlangga," tandasnya.

Sementara, Ridwan mengklarifikasi soal hasil rekomendasi Dewan Pakar Golkar yang disebut berbeda. Menurutnya, masukan anggota Dewan Pakar dalam pertemuan di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono punya makna yang sama, yakni meragukan kepemimpinan dan Airlangga capres.

Tiga rekomendasi Dewan Pakar yakni Airlangga diminta bentuk poros baru, secepatnya mendeklarasikan cawapres, dan membuat program untuk menyapa rakyat. Ridwan menekan ini berarti jika hal tersebut gagal dilakukan Airlangga, maka harus ada Munaslub.

"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus Munaslub. Itu harus. Munaslub bukan haram. Halal dilaksanakan. Karena untuk ubah

keputusan 2019 Airlangga capres itu harus Munaslub. Nggak bisa rapimnas atau rakernas. Ini DPP ngerti enggak AD/RT?" kata Ridwan Hisjam.

"Keputusan Munaslub itu jangan diharamkan. Harmoko munaslub muncul Akbar Tanjung, Bakrie dan Agung Laksono muncul Novanto, munaslub (lagi) muncul Airlangga. Jadi kalau bilang enggak ada Munaslub, enggak ngerti organisasi. Munaslub jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak, terlambat," imbuh dia.

Airlangga Tanggapi Isu Kudeta

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara usai isu akan dikudeta lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh partai berlambang beringin itu.

Isu itu berembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut ada potensi pergantian ketua umum dalam Munaslub mendatang.

"Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7/2023).

Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. "Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. "KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga. (wid,rls,ist,kum/dya)

ISI SURAT TERBUKA KELOMPOK PEMRAKARSA PENGGERAK KEBANGKITAN PARTAI GOLKAR DI ANTARANYA:

- Airlangga Hartarto telah gagal memimpin dalam kerangka membesarkan Partai Golkar dan tercatat merupakan kepemimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar, sebagai eksekusi penerapan "paradigma menguasai partai", bukan "membesarkan partai".
- Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di Tanah Air, sebagai partai utama yang mampu memandu jalannya pembangunan nasional di Tanah Air.

TENTANG AIRLANGGA HARTARTO

- Lahir di Surabaya, 1 Oktober 1962
- S1 Teknik Mesin UGM (1987)
- AMP Wharton School, University of Pennsylvania, AS (1993)
- MBA Monash University, Australia (1996)
- MMT Melbourne Business School University of Melbourne, Australia (1997)
- Menteri Perindustrian (2016-2019)
- Menko Perekonomian (2019-2024)

PERJALANAN AIRLANGGA MENUJU PUCUK PIMPINAN GOLKAR

2004-2009
- Anggota DPR Fraksi Partai Golkar (F-PG)
- Wakil Bendahara DPP Partai Golkar

2009-2014
Anggota DPR F-PG

20 Desember 2017
Terpilih Secara Aklamasi Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2017-2019 Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center

3 DESEMBER 2019
Airlangga Hartarto & Ridwan Hisjam Caketum di Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta 3 Caketum Mundur Bambang Soesatyo, Agun Gunandjar Sudarsa & Ali Yahya

4 DESEMBER 2019
Terpilih Secara Aklamasi Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024

